

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)

2.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) merupakan standar akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. SAK EP disusun sebagai pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan agar informasi yang dihasilkan relevan, andal, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan (IAI, 2021).

SAK EP ditujukan bagi entitas privat, termasuk koperasi, yang aktivitas operasionalnya relatif sederhana namun tetap membutuhkan standar pelaporan keuangan yang sistematis. Dalam konteks koperasi simpan pinjam, penerapan SAK EP diharapkan mampu mencerminkan kondisi keuangan entitas secara wajar dan sesuai dengan karakteristik usahanya (Maulana et al., 2023).

Berdasarkan kedua kutipan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan

Akuntan Indonesia (IAI) bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, termasuk koperasi. SAK EP berfungsi untuk mengatur proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan sehingga menghasilkan informasi yang relevan, andal, dan mudah dipahami. Dalam penerapannya pada koperasi simpan pinjam, SAK EP diharapkan mampu membantu penyusunan laporan keuangan yang sistematis serta mencerminkan kondisi keuangan entitas secara wajar sesuai dengan karakteristik dan kegiatan usahanya.

2.1.2 Tujuan Penerapan SAK EP

Menurut Salman & Sutisna (2025), penerapan SAK EP pada entitas privat bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi penyusunan laporan keuangan entitas privat.
2. Menyediakan informasi keuangan yang lebih relevan untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pihak internal maupun eksternal.
3. Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan entitas, termasuk koperasi.
4. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik.
5. Memperbaiki sistem pencatatan dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh pengurus maupun anggota koperasi.

2.2 Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Menurut SAK EP

Laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) merupakan penyajian terstruktur mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas yang bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2021) SAK EP dirancang khusus untuk entitas privat yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, termasuk koperasi dan lembaga keuangan mikro seperti KSPPS BMT.

Dalam konteks koperasi, laporan keuangan berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban pengurus kepada anggota atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dipercayakan. Menurut Maulana et al. (2023) penerapan SAK EP pada koperasi membawa perubahan signifikan terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan. Dalam studi kasus pada Koperasi XYZ, yang merupakan koperasi simpan pinjam dan perdagangan umum, ditemukan adanya perubahan perlakuan akuntansi terutama pada pengakuan investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi, perlakuan imbalan kerja dan imbalan pasca kerja, serta penerapan pajak tangguhan dalam perhitungan pajak penghasilan. Perubahan tersebut berdampak langsung pada struktur laporan keuangan koperasi, baik dari sisi pengakuan, pengukuran, maupun penyajian informasi keuangan.

Lebih lanjut, Maulana et al. (2023) menegaskan bahwa transisi dari SAK ETAP ke SAK EP menuntut kesiapan koperasi dalam menyesuaikan sistem pencatatan, kebijakan akuntansi, serta pemahaman sumber daya manusia terhadap standar baru. Oleh karena itu, implementasi SAK EP tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan proses adaptasi yang berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan koperasi, khususnya dalam meningkatkan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku dan kebutuhan pengguna laporan keuangan.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan Menurut SAK EP

Tujuan utama laporan keuangan berdasarkan SAK EP adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya ekonomi (IAI, 2021).

Bagi KSPPS BMT, laporan keuangan juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan anggota dan pihak eksternal. penerapan SAK EP pada koperasi mampu memperbaiki kualitas informasi keuangan dan mendukung pengambilan keputusan manajerial yang lebih tepat (Salman & Sutisna, 2025).

2.2.3 Komponen Laporan Keuangan Menurut SAK EP

SAK EP mengatur bahwa laporan keuangan entitas privat sekurang-kurangnya terdiri atas beberapa komponen utama sebagai berikut.

a. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menyajikan kinerja keuangan entitas selama satu periode. Laporan ini memuat pendapatan, beban, serta surplus atau defisit yang dihasilkan. Dalam koperasi syariah, informasi ini penting untuk menilai efektivitas pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan. (Defin & Widiyari, 2025) menyatakan bahwa penerapan SAK EP membantu entitas privat menyajikan kinerja keuangan secara lebih sistematis dan konsisten.

b. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan perubahan saldo ekuitas selama periode berjalan, termasuk sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh dan distribusinya. Bagi koperasi, laporan ini mencerminkan hak ekonomi anggota atas hasil usaha yang dijalankan secara kolektif (IAI, 2021).

c. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Pada koperasi, laporan ini menggambarkan kemampuan entitas dalam mengelola sumber daya ekonomi dan memenuhi kewajiban kepada anggota maupun pihak lain. (Setiajatnika & Hidayat, 2025) menegaskan bahwa struktur laporan

posisi keuangan dalam SAK EP lebih sederhana dibandingkan SAK berbasis IFRS, sehingga lebih sesuai untuk koperasi.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas memberikan informasi mengenai arus masuk dan arus keluar kas yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Informasi ini penting untuk menilai likuiditas dan kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. (Ramadan & Nisa, 2025) menyebutkan bahwa setelah transisi ke SAK EP, laporan arus kas menjadi lebih informatif dan relevan bagi pengguna laporan keuangan.

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan serta rincian pos-pos tertentu dalam laporan keuangan. CALK bertujuan meningkatkan pemahaman pengguna terhadap informasi keuangan yang disajikan. CALK menjadi elemen penting dalam menjelaskan kebijakan pengakuan dan pengukuran yang diterapkan oleh entitas (Cahyani, 2024).

2.2.4 Prinsip Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Laporan Keuangan

SAK EP menetapkan prinsip dasar pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan yang relatif sederhana namun tetap andal. Pengakuan dilakukan ketika suatu transaksi memenuhi definisi dan kriteria pengakuan unsur laporan keuangan. Pengukuran umumnya menggunakan

biaya historis, dengan pertimbangan kemudahan penerapan bagi entitas privat (IAI, 2021).

Dalam hal penyajian, SAK EP menekankan konsistensi, relevansi, dan keandalan informasi. penerapan prinsip-prinsip tersebut membantu entitas privat, termasuk koperasi dan BPR, dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih tertib dan mudah diaudit (Widana, 2024). Hal ini juga sejalan dengan temuan (Stiawan, 2026) yang menekankan bahwa implementasi SAK EP berdampak pada peningkatan kualitas prosedur audit entitas privat.

2.2.5 Penerapan Standar Akuntansi pada Koperasi Syariah

Penerapan standar akuntansi merupakan aspek penting dalam pengelolaan koperasi, termasuk koperasi syariah. Standar akuntansi berfungsi sebagai pedoman dalam proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan agar informasi yang dihasilkan dapat dipahami, andal, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Dalam konteks koperasi syariah, penerapan standar akuntansi tidak hanya bertujuan memenuhi aspek teknis pelaporan keuangan, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan nilai transparansi.

2.2.6 Penerapan Standar Akuntansi pada Koperasi Syariah

Penerapan standar akuntansi pada koperasi merupakan bentuk upaya untuk menciptakan keseragaman dan keterbandingan laporan keuangan antarperiode maupun antarkoperasi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2021) menegaskan bahwa standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan

dapat menyajikan informasi yang wajar dan relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi.

Dalam praktiknya, koperasi sebagai entitas privat umumnya menggunakan standar yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usahanya. Maulana et al. (2023) menjelaskan bahwa penerapan SAK EP pada koperasi membantu menyederhanakan proses akuntansi tanpa mengurangi kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa standar akuntansi berperan sebagai alat pengendalian sekaligus sarana akuntabilitas pengelolaan koperasi.

2.2.7 Akuntansi Koperasi Syariah Secara Umum

Akuntansi koperasi syariah pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan akuntansi koperasi konvensional, yaitu menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi pengguna. Namun, koperasi syariah memiliki kekhasan karena beroperasi berdasarkan prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba.

Menurut (Salman & Sutisna, 2025), akuntansi koperasi syariah harus mampu mencerminkan transaksi berbasis akad syariah secara tepat dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, penerapan standar akuntansi pada koperasi syariah perlu mempertimbangkan substansi ekonomi transaksi serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, SAK EP dinilai cukup relevan karena bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan karakteristik koperasi syariah.

2.2.8 Tantangan Penerapan Standar Akuntansi di Koperasi Syariah

Meskipun penerapan SAK EP memberikan banyak manfaat, koperasi syariah masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Tantangan utama yang sering muncul adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga akuntansi yang memahami standar akuntansi terbaru (Pranesti et al., 2022).

Selain itu, Madaharsa et al. (2025) mengungkapkan bahwa transisi dari SAK ETAP ke SAK EP membutuhkan penyesuaian sistem pencatatan dan pemahaman yang memadai terhadap ketentuan standar baru. Pada koperasi syariah, tantangan ini semakin kompleks karena harus menyesuaikan pencatatan akuntansi dengan karakter transaksi berbasis syariah. Kurangnya pelatihan dan pendampingan juga menjadi faktor penghambat dalam penerapan standar akuntansi secara optimal.

2.2.9 Pentingnya Kepatuhan terhadap SAK EP bagi Koperasi

Kepatuhan terhadap SAK EP menjadi hal yang sangat penting bagi Koperasi sebagai lembaga keuangan syariah berbentuk koperasi. Kepatuhan ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan standar akuntansi, tetapi juga mencerminkan komitmen koperasi terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada anggota.

Menurut (Setiajatnika & Hidayat, 2025) menyatakan bahwa koperasi yang menerapkan SAK EP secara konsisten cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih tertata dan mudah dipahami. Hal ini sejalan dengan

temuan (Defin & Widiyastuti, 2025) yang menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap SAK EP meningkatkan kesiapan laporan keuangan untuk keperluan evaluasi dan audit. Bagi Koperasi, penerapan SAK EP juga mendukung terciptanya kepercayaan anggota terhadap pengelolaan dana simpanan dan pembiayaan.

2.2.10 Perbedaan SAK EP dengan SAK ETAP

SAK EP merupakan standar akuntansi yang ditujukan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, tetapi memiliki kebutuhan pelaporan keuangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan entitas yang menggunakan standar akuntansi yang lebih sederhana. SAK EP disusun untuk memberikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan bagi pengguna laporan keuangan.

Sementara itu, SAK ETAP merupakan standar akuntansi yang sebelumnya digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, termasuk koperasi dan perusahaan swasta tertentu. SAK ETAP memiliki pengaturan yang lebih sederhana dibandingkan dengan standar akuntansi untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik. Namun, sejak diberlakukannya SAK EP, SAK EP menggantikan SAK ETAP sebagai standar yang digunakan oleh entitas yang memenuhi kriteria penerapan SAK EP (Setiajatinika & Hidayat, 2025).

Perbedaan antara SAK EP dan SAK ETAP dapat dilihat dari ruang lingkup, pengaturan akuntansi, serta penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. SAK EP memiliki pengaturan yang lebih komprehensif

dibandingkan dengan SAK ETAP, sehingga dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap bagi pengguna laporan keuangan. Bagi koperasi yang memiliki struktur organisasi dan transaksi yang relatif kompleks, penerapan SAK EP dinilai lebih tepat karena mampu menghasilkan informasi keuangan yang lebih relevan dan komprehensif.

Tabel 1 Perbedaan SAK EP dan SAK ETAP

No	Aspek	SAK EP	SAK ETAP
1.	Pengertian	Standar akuntansi keuangan yang ditujukan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan memenuhi kriteria penerapan SAK EP.	Standar akuntansi yang sebelumnya ditujukan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik yang memenuhi kriteria penerapan SAK ETAP.
2.	Ruang Lingkup	Digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, tetapi membutuhkan standar pelaporan keuangan yang lebih komprehensif.	Digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik dengan kebutuhan pelaporan keuangan yang lebih sederhana.
3.	Kompleksitas pengaturan	Memiliki pengaturan akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang lebih komprehensif.	Memiliki pengaturan yang relatif lebih sederhana dibandingkan SAK EP.
4.	Penerapan	Mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025 dan menggantikan SAK ETAP bagi entitas yang memenuhi kriteria penerapannya.	Merupakan standar yang digunakan sebelum SAK EP berlaku dan kemudian digantikan oleh SAK EP.
5.	Pelaporan Keuangan	Menghasilkan informasi keuangan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan.	Menyediakan informasi keuangan dengan pendekatan yang lebih sederhana bagi entitas tanpa akuntabilitas publik.

Sumber : Data diolah, 2026

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu disusun sebagai dasar pembanding dan penguat dalam penelitian mengenai Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) pada KSPPS BMT Al Mumtaz Pacul. Berbagai penelitian sebelumnya yang relevan digunakan untuk memahami penerapan SAK EP, kesiapan entitas privat, serta dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun uraian penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Jaka Maulana ¹ , Marismiati ² , 2023)	Analisis penerapan SAK entitas privat (SAK EP) pada laporan keuangan Koperasi XYZ.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif studi kasus.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAK EP menyebabkan perubahan perlakuan akuntansi pada beberapa pos penting, antara lain pengakuan investasi pada entitas anak dan asosiasi, imbalan kerja, imbalan pasca kerja, serta penerapan pajak

						tanggung.
						Perubahan tersebut berdampak pada penyajian laporan keuangan yang menjadi lebih komprehensif dan selaras dengan ketentuan SAK EP yang mulai berlaku efektif tahun 2025.
2	Defin & Widiyari, (2025)	Penerapan SAK Entitas Privat untuk Penyusunan Laporan Keuangan PT KPM.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif			Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman karyawan terhadap SAK EP meningkat setelah diberikan pelatihan. Sebagian besar partisipan mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EP secara tepat. Penerapan standar ini dinilai mampu meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pihak eksternal terhadap entitas.

3	Salman & Sutisna (2025)	Implementasi SAK Entitas Privat (SAK EP) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pendampingan dan studi kasus.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAK EP mampu meningkatkan kualitas dan konsistensi laporan keuangan koperasi. Laporan keuangan yang disusun menjadi lebih lengkap, mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.
4.	Ramadan & Nisa (2025)	Analisis dampak transisi dari SAK ETAP ke SAK EP terhadap laporan keuangan dan implikasinya pada perpajakan.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan pendekatan analisis deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi dari SAK ETAP ke SAK EP berdampak signifikan pada pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan

				laporan keuangan, khususnya pada pendapatan, aset tetap, imbalan pasca kerja, dan pajak tangguhan. Transisi ini juga menimbulkan tantangan berupa keterbatasan SDM dan literasi akuntansi.
5	(Nuha et al., 2024)	Menemukan pengaruh penerapan SAK entitas privat terhadap penyusunan laporan keuangan KUD Tri Karsa Jaya.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa laporan keuangan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUD Tri Karsa Jaya belum sepenuhnya menerapkan SAK EP, terutama dalam penyajian laporan keuangan dan pengungkapan informasi pada CALK. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian dan peningkatan pemahaman terhadap standar baru.

6.	Baharuddin et al (2025)	Pengaruh Peralihan SAK ETAP ke SAK EP terhadap Kinerja Keuangan: Studi Empiris pada PT ABC sebagai Entitas Privat.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif komparatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAK EP berdampak pada perbaikan likuiditas dan struktur modal perusahaan, meskipun dampaknya terhadap profitabilitas belum signifikan.
7.	Setiajatnika & Hidayat, (2025)	Komparasi Standar Akuntansi Keuangan SAK ETAP dan SAK EP dalam Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif komparatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan koperasi dalam menerapkan SAK EP masih rendah akibat keterbatasan SDM dan system informasi akuntansi.
8.	(Pranesti et al., 2022)	Kesiapan Perusahaan dalam menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Badan	Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara terstruktur.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMD belum siap menerapkan SAK EP karena keterbatasan

		Swasta (SAK EP).		pengetahuan dan SDM.
9.	(Madaharsa et al., 2025)	Analisis Implementasi SAK ETAP Menjadi SAK EP: Studi Komparatif Perusahaan Manufaktur dan Jasa.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus ganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi ke SAK EP menuntut peningkatan sistem informasi dan kompetensi SDM.
10.	(Stiawan, 2026)	Implementasi SAK entitas privat dan implikasinya terhadap prosedur audit: Perspektif auditor.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif eksploratif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAK EP meningkatkan kompleksitas audit.

Sumber: Berbagai Jurnal, (2026)